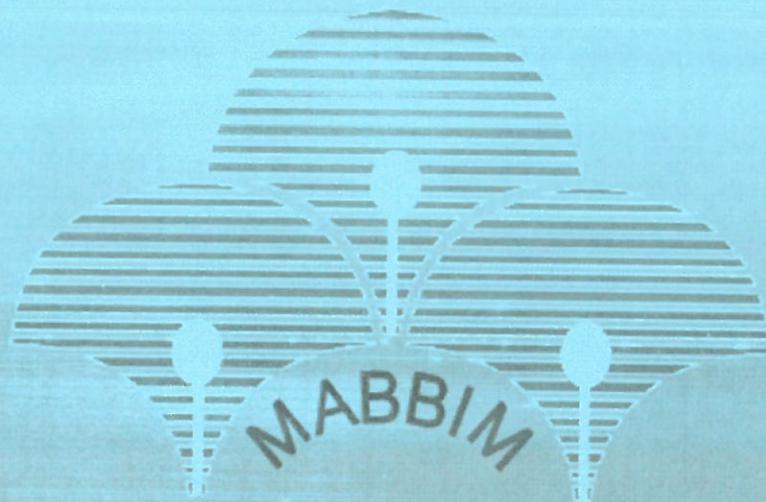




# SEMINAR KEBAHASAAN

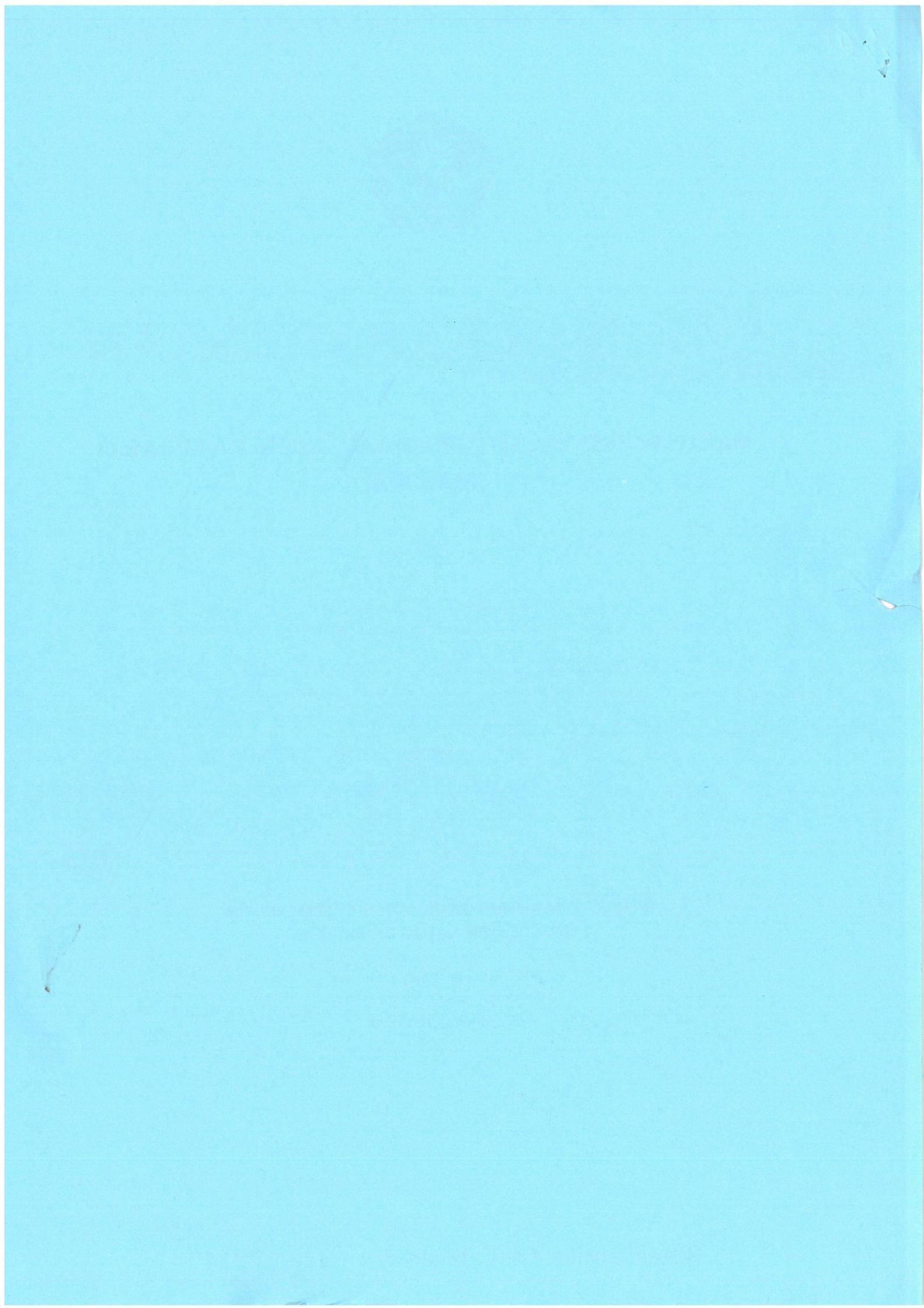
MAJELIS BAHASA BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA  
(MABBIM)



PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDIDIKAN  
UNTUK PENYEMAIAN ISTILAH MABBIM

Prof. Dr. Bambang Yulianto  
Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya, Indonesia

Hotel Santika TMII, Jakarta, 4—5 Juni 2014



## PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPENDIDIKAN UNTUK PENYEMAIAN ISTILAH MABBIM

Prof. Dr. Bambang Yulianto  
Universitas Negeri Surabaya  
Surabaya, Indonesia

### **Pendahuluan**

Dalam Piagam Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), yang ditandatangani di Jakarta tanggal 11 Juni 1987, dinyatakan bahwa Mabbim dibentuk dengan tujuan (1) meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota; (2) meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas; (3) mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern lain; (4) mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan; dan (5) mengadakan pertemuan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota (Sugono [Ed.], 2008: 51). Dari pernyataan di atas terungkap bahwa ketiga negara menyepakati agar (1) bahasa nasional masing-masing negara tetap dipelihara dan dikembangkan dan (2) melakukan penyelarasan bahasa di antara ketiga bahasa nasional tersebut.

Kerja sama yang telah dilakukan sejak 1959 oleh Indonesia dan Malaysia pada awalnya dan diikuti Brunei Darussalam pada 1985 itu telah menghasilkan daftar komulatif istilah, glosarium bidang ilmu, kamus bidang ilmu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia/Melayu, pedoman umum pembentukan istilah, pedoman penyusunan kamus bidang ilmu, prosiding seminar, dan jurnal *Rampak Serantau* (Sugono [Ed.], 2008:40). Meskipun demikian, penyebarluasan hasilnya ke seluruh khalayak sasaran, khususnya di Indonesia, belumlah menggembirakan. Hal itu terungkap dari berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan rendahnya kemampuan masyarakat terpelajar menggunakan ejaan, misalnya. Penggunaan istilah asing juga terlihat lebih menggejala dibandingkan dengan istilah yang telah dirumuskan oleh Mabbim, seperti *email* lebih banyak digunakan dibandingkan dengan *pos-el*. Bahkan, kata terakhir ini terasa asing bagi banyak orang di Indonesia. Kata *kepo* (*knowing every particular object*) lebih disukai remaja masa kini daripada kata *melit*, yang maknanya sepadan. Kata *melit* sangat asing bagi telinga kebanyakan orang meskipun secara fonotaktis berterima di telinga mereka.

Dengan demikian, upaya yang telah menghasilkan sedemikian banyak kodifikasi itu akan terasa sia-sia jika tanpa diikuti langkah dan strategi pemasaran yang jitu. Strategi yang jitu menuntut tindakan nyata yang efektif dan terus-menerus. Tindakan nyata haruslah variatif, bukan tunggal mengingat sasaran pemasarannya berlapis-lapis dan beragam. Tindakan yang terus-menerus mengindikasikan upaya yang tanpa mengenal lelah. Tindakan itu akan berpacu dengan derasnya arus perubahan yang mengglobal.

Berdasarkan uraian di atas, dalam makalah ini diungkapkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memasarkan hasil kodifikasi, khususnya melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) kependidikan. Pembahasan itu meliputi pentingnya penguatan SDM kependidikan, sasaran penguatan, materi penguatan, dan cara penguatan.

### **Pentingnya Penguatan SDM Kependidikan**

Peran SDM kependidikan menjadi amat penting dan strategis dalam menyebarluaskan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Mabbim, terutama produk yang berupa pedoman dan peristilahan. Namun, harus disadari bahwa peran ini sangatlah terbatas karena hanya

menyasar pada masyarakat terpelajar. Sementara itu, pada masyarakat di luarnya seharusnya disandarkan harapan kepada jurnalis media masa, pejabat publik, ataupun tokoh-tokoh anutan masyarakat. Di dalam menjalankan perannya, mereka harus selaras agar tidak timbul perbedaan yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan, baik dari sisi waktu maupun substansinya. Di sinilah peran sentral Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (selanjutnya disebut Badan Bahasa) untuk mengatasinya. Tindakan yang cepat dan tepat menjadi kunci kesuksesan badan ini. Tindakan yang cepat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan bahasa yang terus deras mengalir.

Di samping itu, dalam kenyataannya ada beberapa faktor lain yang dapat mendorong diperlukannya penguatan bagi SDM kependidikan terkait dengan penyemaian hasil kodifikasi Mabbim, yakni 1) rendahnya rata-rata kompetensi profesional pendidik, 2) kurangnya pajanan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah, 3) kecepatan masuknya unsur bahasa lain melebihi kecepatan hasil kerja Mabbim, 4) sedikitnya contoh keteladanan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat, 5) pajanan penggunaan bahasa tulis di lapangan yang tidak mencerminkan kecintaan dan kebanggaan berbahasa Indonesia, dan 6) kurangnya kesadaran masyarakat (terpelajar) untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

① Faktor pendorong pertama menyangkut rendahnya rata-rata kompetensi profesional pendidik. Kompetensi profesional pendidik Bahasa Indonesia menyangkut penguasaan aspek-aspek linguistis, keterampilan berbahasa, dan kesastraan. Dari hasil penelitian Yulianto dkk. (2011) terungkap bahwa kompetensi profesional pendidik rata-rata rendah. Hal ini berkorelasi dengan hasil belajar siswa. Berdasarkan gambaran peta kompetensi siswa SMA di wilayah Jatim yang terdiri atas empat belas kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep) yang datanya diolah dari hasil unas (khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia) dan gambaran berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan yang terjadi di wilayah itu, dilakukan wawancara mendalam, observasi terhadap guru yang mengajar di kelas, dan uji kompetensi guru. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) guru kurang menguasai materi yang ada di Standar Isi, (2) guru kurang kompeten dalam memanfaatkan sarana mengajar, khususnya IT, (3) guru kurang kompeten dalam menyusun dan memanfaatkan perangkat pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, (4) guru belum menguasai strategi dan teknik pembelajaran terkini, (5) guru kurang kompeten dalam menyusun asesmen yang berbasis higher order thinking, (6) sebagian guru berasal non-LPTK, dan (7) terjadinya reduksi kompetensi guru.

Kenyataan di atas, khususnya yang menyangkut butir (1) dan (7), dapat diatasi melalui penguatan kompetensi pendidik di bidang ilmunya agar peserta didik mendapat imbas yang positif dari peningkatan kompetensi pendidiknya.

② Faktor kedua yang dapat mendorong perlunya penguatan SDM kependidikan adalah kurangnya pajanan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah. Dari perspektif pemerolehan, peran pajanan (*eksposure*) tidak dapat dikesalkan. Hasil penelitian Yulianto (2007 dan 2010) mengungkapkan pentingnya pajanan dalam keberhasilan pembelajaran bahasa. Pajanan yang kondusif di sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis di lingkungan sekolah. Di sini hasil kodifikasi Mabbim dapat diimplementasikan. Guru dapat berkreasi memajukan bahasa tulis lewat lembar komunikasi yang ditempelkan di tempat-tempat strategis di sekolah, misalnya. Guru pun harus memberikan teladan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan demikian, siswa akan tertantang dan terdorong untuk menerapkan apa

yang dibacanya. Namun, dalam kenyataannya pajanan penggunaan tersebut tidak banyak ditemukan di sekolah.

Faktor lain yang mendorong perlunya penguatan SDM kependidikan adalah adanya arus informasi yang disertai peristilahan asing yang cepat dan dalam jumlah yang banyak. Istilah-istilah asing ini masuk ke Indonesia, khususnya, yang terkait dengan adanya produk-produk baru tanpa melalui saringan. Kecepatannya belum mampu ditanggulangi atau disaingi oleh lembaga atau badan yang berwenang menanganinya (Mabbim). Oleh karena itu, jika terdapat peristilah yang salah menurut kajian linguistik, sulit dibenahi karena mungkin telah memfosil sebab telah terlalu lama dan lazim digunakan. Penguatan kompetensi pendidik diharapkan dapat memberikan penangkal yang berimbang dan sekaligus membenahi kekeliruan.

Sementara itu, sedikitnya contoh keteladanan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat juga menjadi faktor pendorong lain perlunya penguatan kompetensi pada pendidik dan tenaga kependidikan. Saat ini sulit ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi yang luas di berbagai media. Dalam pidato resmi pejabat publik, komentar tokoh masyarakat, atau dialog resmi di televisi, contoh pemakaian bahasa yang santun dan berkaidah sedikit sekali ditemukan. Bahkan, acara-acara di televisi yang banyak mendapat perhatian penonton justru acara yang dikemas dalam bahasa yang gaul, tidak tertata, dan kurang mengedepankan nilai-nilai kesantunan. Sedikitnya contoh keteladanan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat juga menjadi pendorong perlunya penguatan SDM kependidikan.

Sejalan dengan hal itu, terlihat pula penggunaan bahasa tulis di lapangan yang tidak mencerminkan kecintaan dan kebanggaan berbahasa Indonesia. Kenyataan ini turut mendorong perlunya penguatan SDM kependidikan karena peran penting SDM kependidikan dalam mendidik generasi bangsa. Penggunaan kata atau istilah bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat marak dan mudah ditemukan di mana-mana, yakni tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah marak sampai ke pelosok-pelosok. Penamaan produk olahan, perumahan, perusahaan, toko, kegiatan, acara hiburan, bahkan acara resmi pemerintah banyak yang menggunakan istilah atau kata bahasa Inggris. Bagi mereka, bahasa Inggris lebih memberikan kemegahan, kegagahan, dan prestise yang tinggi. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Karena itu, melalui pendidikan di sekolah kelak dapat dihasilkan tokoh-tokoh yang lebih memiliki rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia.

Di samping itu, dari hasil amatan diketahui bahwa banyak pelajar yang kurang mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di dalam diskusi-diskusi ilmiah. Ragam bahasa yang lebih banyak dipakai adalah ragam bahasa yang banyak menyelipkan leksikon dan pembentukan kata bahasa Betawi karena menirukan tokoh artis ibu kota. Dalam bahasa tulis pun tidak jarang ditemukan ragam serupa. Pada kertas ujian tidak jarang ditemukan tulisan siswa yang menggunakan ragam bahasa sebagaimana yang dituliskannya sewaktu menulis pesan pendek (*sms*) pada telepon seluler. Karena itu, penguatan SDM kependidikan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam rangka menyemaikan hasil kodifikasi Mabbim, khususnya untuk mendorong terciptanya cara cinta dan bangga berbahasa Indonesia/Melayu bagi komunitas Mabbim.

### **Sasaran Penguatan**

Dalam makalah ini yang dimaksudkan dengan SDM kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua istilah itu sangat jelas dibedakan di dalam *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan. Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Sementara itu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Seperti yang dijelaskan di depan, sumber daya manusia kependidikan berperan penting dalam memasarkan hasil kodifikasi bahasa pada masyarakat terpelajar. Untuk itu, pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 40 ayat 2c, yakni pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Salah satu sikap keteladanan dalam rangka menjaga nama baik profesi adalah penggunaan bahasa. Di sinilah pentingnya muara memasarkan hasil kodifikasi Mabbim dimulai. Para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi ujung tombak utama pemasaran. Mereka harus mampu mewujudkan penggunaan bahasa, yang mencerminkan bahasa Indonesia/Melayu yang baik dan benar, baik dalam pergaulan kedinasan maupun pergaulan sehari-hari sesuai dengan konteksnya.

Dalam konteks yang sangat umum, peran pendidik, terutama guru dan dosen, menempati posisi yang strategis. Mereka inilah yang banyak berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, baik dalam konteks pembelajaran maupun di luarnya. Dalam konteks pembelajaran, mereka sangat intens berinteraksi dengan peserta didik melalui komunikasi lisan proses belajar mengajar, penyediaan bahan ajar, dan sarana lainnya yang bersentuhan dengan penggunaan bahasa. Karena itu, guru dan dosen diharapkan dapat menggunakan bahasa hasil kodifikasi Mabbim dalam praktik berbahasa lisan dan tulis, dapat memilih bahan ajar yang sesuai dan mendukung penggunaan bahasa tersebut, serta mampu menciptakan iklim penggunaan bahasa yang ideal di lingkungan belajarnya.

Peran tenaga kependidikan juga tidak kalah pentingnya. Peran pengelola pendidikan (kepala sekolah/katua jurusan di perguruan tinggi, misalnya), staf tata usaha, pustakawan, laboran, atau teknisi sumber belajar sangat penting pula dalam rangka mendukung pendidik. Mereka juga banyak berinteraksi dengan peserta didik di luar kelas. Komunikasi mereka dapat berupa bahasa lisan maupun tulis melalui surat atau pengumuman dan lembar-lembar kerja yang harus dikerjakan peserta didik. Wahana inilah yang menjadikan peran mereka dalam memasarkan hasil kodifikasi Mabbim ini penting.

### **Materi Penguatan**

Di samping istilah-istilah yang dikembangkan oleh Mabbim yang menjadi bahan penguatan kepada SDM kependidikan, strategi penyampaian di kelas perlu pula dibekalkan kepada mereka. Yang pertama terkait dengan kajian linguistik, sedangkan yang kedua terkait dengan psikolinguistik, khususnya yang menyangkut pemerolehan bahasa, yang dalam konteks ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia.

Dalam perspektif pemerolehan bahasa, dikenal adanya tiga pendekatan utama pemerolehan/pembelajaran bahasa, yakni pendekatan behaviorime, nativisme, dan interaksionisme. Pendekatan pertama dan kedua lebih bersifat dikotomis karena menurut teori belajar bahasa yang dipengaruhi pendekatan behaviorisme, faktor penting penentu keberhasilan belajar bahasa adalah faktor luar (lingkungan), sedangkan menurut teori

belajar bahasa di bawah pengaruh pendekatan nativisme, keberhasilan pembelajaran bahasa ditentukan oleh faktor internal siswa yang bersifat bawaan. Teori belajar bahasa yang lebih moderat adalah yang menggunakan pendekatan interaksionisme. Pada pendekatan ini diyakini bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental siswa dengan lingkungan bahasa. Interaksi antara keduanya adalah manifestasi dari interaksi verbal yang aktual antara siswa dengan orang lain. Seorang anak yang sejak lahir sudah dilengkapi dengan LAD (language acquisition device), tidak secara otomatis bisa menguasai bahasa tertentu tanpa dihadapkannya masukan yang sesuai untuk keperluan itu. Dari beberapa penelitian pemerolehan bahasa kedua terungkap bahwa yang terpenting bagi siswa bukan sistem bahasa kedua, melainkan apa yang dapat digunakannya dengan bahasa kedua tersebut untuk berinteraksi dengan orang lain.

Menurut pendekatan interaksionisme, interaksi antara faktor internal dengan faktor eksternal bersifat sentral. Titik awal pendekatan ini adalah kemampuan kognitif anak dalam menemukan struktur bahasa di sekitarnya. Baik pemahaman maupun produksi bahasa pada anak-anak dipandang sebagai sistem prosedur penemuan yang secara terus-menerus berkembang dan berubah (Yulianto, 2007: 24).

Berdasarkan hal itu, guru bahasa dalam mengajar bukan hanya sekadar menentukan isi dan struktur pengajaran. Mereka juga harus menentukan bagaimana bahasa itu diajarkan. Di sini guru berhadapan dengan metodologi. Mereka harus menentukan apakah bahan itu perlu didrillkan atau tidak, seberapa banyak yang didrillkan apabila diperlukan, apakah perlu membetulkan kesalahan yang dibuat siswa atau tidak, kapan itu harus dilakukan dan berapa kali hal itu dilaksanakan, dan sebagainya, misalnya. Dengan menggunakan metode yang dipilihnya itu, guru berupaya mengatur strategi belajar-mengajar bahasa. Namun, tidak ada jaminan bahwa metode yang dipilih guru itu sesuai dengan cara belajar yang dilakukan siswa. Sebagai contoh, guru menentukan pembelajaran dengan memusatkan pada ketepatan tata bahasa, sedangkan siswa memusatkan pada pemerolehan makna, yang terlepas dari bagaimana bentuk tata bahasanya. Bisa juga guru sedang memusatkan pembelajaran pada penguasaan butir demi butir aspek bahasa, sedangkan siswa belajar bahasa secara global.

Proses belajar bahasa mungkin tidak seperti yang dipertimbangkan oleh metodologi guru (Ellis, 2000). Untuk menemukan bagaimana siswa memanfaatkan data bahasa yang disediakan, perlu dikaji strategi yang digunakan oleh siswa tersebut. Dalam hal ini, penelitian diperlukan untuk mengungkapkan mengapa siswa belajar dengan cara mereka sendiri.

Para guru yang menguasai suatu teori belajar bahasa mungkin akan mengajar sesuai dengan seperangkat prinsip tentang cara siswa belajar/bertindak. Dalam banyak hal, pandangan guru tentang bagaimana seseorang belajar bahasa ini tidak tampak secara eksplisit. Karena itu, tidak jarang guru tanpa menyadari apa yang dilakukan dalam pengajaran itu sebenarnya telah menggambarkan bahwa dia telah menerapkan teori atau prinsip-prinsip belajar bahasa tertentu. Apapun alasannya, pengajaran bahasa tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa suatu teori belajar bahasa (Ellis, 2000).

Teori belajar bahasa terutama sekali perlu dikuasai oleh perancang kurikulum bahasa. Perancang kurikulum dapat mengaplikasikan teori atau prinsip-prinsip belajar bahasa yang diyakininya dalam kurikulum. Pendekatan apa yang ditekankan dalam kurikulum, bagaimana urutan penyajian bahannya, bagaimana cara atau strategi pembelajarannya dapat dicantumkan dalam kurikulum.

Di samping itu, para penyusun buku teks/pelajaran bahasa harus pula menguasai teori belajar bahasa. Dengan menguasai secara baik teori belajar bahasa ini, mereka dapat sekaligus menafsirkan dengan tepat kurikulum bahasa yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun buku teks pelajaran. Dalam hal ini sekaligus mereka dapat memilihkan bahan yang tepat dan bermakna. Urutan penyajian bahan-bahan itu juga harus

mempertimbangkan segi-segi belajar bahasa. Tentu saja, pendekatan apa yang dipilihnya tidak terlepas dari kurikulum maupun prinsip belajar yang dianut oleh kurikulum tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Bahasa telah mengambil peran penting dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Peran itu tampak dengan lahirnya buku teks pelajaran yang dibidani oleh Badan Bahasa, seperti buku *Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan* untuk pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat SMP/MTs. Karena itu, lahirnya buku tersebut akan memberikan angin segar bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan sepatutnya disambut positif, terutama oleh kalangan guru Bahasa Indonesia. Di samping akan memberikan kesan positif terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah karena selama ini kegiatan Badan Bahasa kurang menyentuh langsung keperluan guru di lapangan, terbitnya buku teks pelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan model berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi guru dan siswa.

Buku tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan pengajaran berbasis teks. Hal itu secara gamblang dinyatakan pada bagian pengantar buku, yakni bahwa buku itu dirancang berdasarkan teks. Melalui buku tersebut diharapkan siswa mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Berdasarkan pendekatan itu, bahasa Indonesia diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang berfungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunaannya pada konteks sosial-budaya akademis. Teks dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna secara kontekstual (Kemendikbud, 2013: v).

Berdasarkan hal itu, tugas Badan Bahasa menjadi tidak ringan ketika harus dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum sekolah. Di samping harus menentukan muatan isi dan urutan penyajiannya, kurikulum harus memuat cara pengajarannya. Cara pengajaran ini dipengaruhi oleh teori atau pendekatan pembelajaran yang sesuai. Peran ini menjadi salah satu penentu keberhasilan penyemaian hasil kodifikasi Mabbim di atas.

Tugas menyampaikan kajian tentang teori belajar bahasa yang terimplikasi pada metode pengajaran ini menjadi beban LPTK yang menghasilkan calon guru. Karena itu, diperlukan sinergi yang antara Badan Bahasa/Balai/Kantor Bahasa dengan dinas pendidikan dan LPTK pencetak guru Bahasa Indonesia.

#### **Cara Penguatan SDM Kependidikan**

Di atas dipaparkan pentingnya peran SDM kependidikan dalam rangka pemasaran hasil kodifikasi Mabbim. Lalu, bagaimana caranya menguatkan para pemasar tersebut agar mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga sasaran akhir, yakni tersebarnya hasil kodifikasi, dapat tercapai? Badan Bahasa, yang secara konstitusional memiliki tanggung jawab dan kewenangan memasarkan hasil kodifikasi tersebut harus mengambil inisiatif yang progresif melalui berbagai tindakan untuk menguatkan kompetensi dan peran SDM kependidikan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh badan ini. Salah satunya adalah melalui pelatihan, baik pelatihan langsung maupun pelatihan berjenjang. Pelatihan langsung dimaksudkan adalah pelatihan yang dilakukan kepada sasaran pengguna bahasa secara langsung, yakni masyarakat luas. Sementara itu, pelatihan berjenjang dilakukan kepada sekelompok orang yang akan menjadi pemasar atau pelatih. Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan masyarakat luas dan pemasar adalah SDM kependidikan, yakni pendidik dan tenaga kependidikan. Cara kedua dipandang lebih efektif karena pada tahap pertama dipilih orang-orang yang memiliki kompetensi lebih unggul dalam kebahasaan.

Saat ini telah ada organisasi (kelompok) guru bidang studi Bahasa Indonesia yang bernama MGMP BI (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia). Organisasi ini telah ada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, baik untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat. Organisasi ini menjadi ajang komunikasi untuk

bertukar pengalaman bagi guru bidang studi di lingkungan wilayah tertentu. Karena itu, muncullah MGMP BI SMP/MTs, MGMP BI SMA/MA, dan MGMP BI SMK. Organisasi ini bisa dioptimalkan perannya dalam rangka menyemaikan hasil kodifikasi Mabbim.

Jika selama ini Badan Bahasa menyelenggarakan kegiatan penataran bagi penyuluh dengan sasaran kegiatan staf Balai/Kantor Bahasa, staf Badan Bahasa, serta dosen, sudah saatnya guru Bahasa Indonesia, yang *nota bene* tergabung ke dalam MGMP BI dilibatkan. Pada awalnya pelatihan dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, dari mereka itu dihasilkan pelatih yang akan memberikan bekal kepada guru di tingkat kecamatan atau langsung kepada guru sasaran di tingkat kecamatan. Kemampuan dan pengetahuan pelatih ini harus pula selalu diperbarui dan diperbaiki untuk menerima perkembangan peristilahan yang terus bertumbuh dan berkembang. Untuk kegiatan ini Badan Bahasa dapat memanfaatkan Balai/Kantor Bahasa yang terdekat memfasilitasi.

Di samping itu, untuk menguatkan kompetensi kebahasaan SDM kependidikan dapat pula dilakukan kegiatan seminar dan pertemuan berkala. Melalui seminar berbagai gagasan baru dapat mengemuka. Dalam seminar pun akan diketahui berbagai persoalan di lapangan serta ditemukan alternatif penyelesaiannya. Informasi yang demikian perlu diketahui oleh semua guru (baca guru Bahasa Indonesia) agar guru di lapangan dapat mendapatkan contoh penyelesaian apabila yang bersangkutan menemui permasalahan serupa.

Pertemuan berkala para pemasar, khususnya anggota MGMP BI, dapat dijadikan ajang penguatan kompetensi mereka. Meskipun lebih bersifat instruktif bila dibandingkan dengan seminar, kegiatan ini akan sangat bermanfaat apabila dapat diatur secara tepat. Pada pertemuan berkala MGMP BI, misalnya, kelompok ini dapat mendatangkan narasumber yang relevan dengan kebutuhan mereka. Namun sayangnya, organisasi yang di bawah binaan dinas pendidikan setempat ini tidak seluruhnya eksis sebagaimana yang diharapkan.

Penerbitan hasil kodifikasi yang terstandar menjadi alternatif yang penting dalam penguatan kompetensi SDM kependidikan. Penerbitan ini harus ditangani atau di bawah pengawasan Badan Bahasa. Bentuk yang paling sederhana adalah penerbitan lembar komunikasi (yang pada era tahun 1980-an pernah dilakukan oleh Pusat Bahasa, embrio awal Badan Bahasa). Lembar komunikasi ini bersifat berkala, yang diterbitkan secara periodik. Pada era sekarang kehadirannya dapat digantikan dengan pemuatan pada unggahan di laman tertentu. Cara ini dipandang lebih efektif, efisien, dan membelajarkan teknologi informasi kepada sasaran.

Bentuk hasil penerbitan yang lain adalah jurnal ilmiah yang terkait, buku saku, buku penuntun praktis berbahasa, buku pelajaran, atau buku-buku lain yang relevan. Sebenarnya, terbitan jenis ini telah dilakukan oleh Badan Bahasa. Namun, yang menjadi kendala adalah penyebarluasannya. Jika produk terbitan tersebut dijadikan bacaan wajib bagi guru/dosen melalui berlangganan tetap, rasanya proses sosialisasi akan berjalan lebih efektif. Tentang persoalan bagaimana prosesnya, barangkali dinas pendidikan dapat dilibatkan dalam mengatasi persoalan ini.

Proses penguatan yang lain yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Cara ini dipandang lebih terstruktur bila dibandingkan dengan pelatihan. Secara konkret Badan Bahasa harus terlibat dalam penyusunan kurikulum bahasa, baik untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Keterlibatan ini menjadi sangat berarti karena secara substantif hasil kodifikasi itu menjadi bagian yang dikaji secara ilmiah. Dengan demikian, ilmu itu akan selalu berkembang dan kodifikasi akan bertumbuh. Keterlibatan Badan Bahasa dalam penyusunan kurikulum tidak harus dimaknai sebagai proses pemaksaan yang tunggal, namun lebih dimaknai sebagai penguat, pelengkap, dan

penyempurna. Dengan adanya substansi kajian dalam kurikulum ini, mau tidak mau guru/dosen harus menyiapkan diri secara matang.

Cara penguatan yang lain adalah melalui jalur pemberdayaan organisasi profesi yang terkait, yang salah satunya adalah HPBI (Himpunan Pembina Bahasa Indonesia). Sebenarnya saat ini HPBI telah ada keberadaannya. Di tingkat nasional ada HPBI Pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga terdapat HPBI wilayah dan cabang. Di beberapa daerah HPBI ini hidup segan mati pun enggan (tak mau). Berbeda dengan MGMP BI yang keberadaannya didukung oleh dinas pendidikan di daerah dan keanggotaannya homogen, HPBI ini merupakan organisasi independen, yang keanggotaannya juga lebih bervariasi. HPBI dianggotai guru/dosen Bahasa Indonesia, jurnalis, pejabat publik, serta tokoh masyarakat yang mencintai dan peduli kepada bahasa Indonesia. HPBI di daerah biasanya dimotori oleh dosen di perguruan tinggi dan Balai Bahasa setempat. Selama ini koordinasi HPBI Pusat dengan HPBI Wilayah belum berjalan secara optimal; begitu pula yang terjadi di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota. Jika HPBI ini diberdayakan melalui pelibatan Badan Bahasa, upaya penguatan SDM kependidikan akan berjalan lebih efektif.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di depan terungkap bahwa SDM kependidikan, khususnya pendidik, sangat strategis dalam rangka menyemaikan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Mabbim. Peran ini tidak akan terwujud tanpa penguatan kompetensi mereka karena saat ini kompetensi profesional pendidik masih memprihatinkan. Penguatan itu dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya pelatihan langsung ke sasaran maupun pelatihan berjenjang, seminar dan pertemuan berkala, penerbitan hasil kodifikasi untuk dijadikan bacaan berlangganan bagi pendidik, pendidikan melalui penyusunan kurikulum, serta pemberdayaan jaringan organisasi profesi, seperti HPBI dan MGMP BI. Penguatan itu dilakukan dengan melibatkan Badan /Balai/Kantor Bahasa, Dinas Pendidikan di daerah, organisasi profesi (HPBI dan MGMP BI) dan dinas terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Ellis, Rod. 2000. *Understanding Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- Kemendikbud. 2013. *Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan*. Jakarta.
- Sugono, Dendy (Ed.). 2008. *Sekilas Mabbim*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Yulianto, Bambang dkk. 2011. *Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur 1*. Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian Unesa.
- Yulianto, Bambang. 2007. *Pengantar Teori Belajar Bahasa*. Surabaya: Unesa University Press.
- Yulianto, Bambang. 2010. *Perkembangan Fonologis Tuturan Bahasa Indonesia Anak*. Surabaya: Unesa University Press.